

**LAPORAN PENELITIAN  
PENELITIAN FISIP  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**STRATEGI *CYBER POLICING* DALAM PENERAPAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE***

**TIM PENGUSUL:**

<b>Intan Fitri Meutia, Ph.D.</b>	<b>0020068502 (5975146)</b>
<b>Dra. Dian Kagungan, MH</b>	<b>0015086903 (6041120)</b>
<b>Nana Mulyana, S.IP., M.Si.</b>	<b>0015067115 (6156803)</b>
<b>Dr. Novita Tresiana, M.Si.</b>	<b>0018097205 (5975918)</b>

Dibiayai DIPA Penelitian FISIP Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019  
Nomor **541/UN26.16/KU.02.00.01/2019**  
Tanggal 17 Juni 2019

**Penelitian Dasar**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG**

---

Judul Penelitian	: Strategi <i>Cyber Policing</i> dalam Penerapan <i>Collaborative Governance</i>
Manfaat social ekonomi	: Mendeskripsikan dan menganalisis strategi cyber policing Kepolisian RI dalam bentuk penerapan collaborative governance antara kepolisian dan stake holders terkait dalam upaya pencegahan transformasi bentuk kejahatan digital.
Jenis penelitian	: Penelitian dasar
Ketua Peneliti	
Nama Lengkap	: Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D
a. NIDN	: 0020068502
b. SINTA ID	: 5975146
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Administrasi Publik
e. Nomor HP	: 081369694554
f. Alamat surel (e-mail)	: intan.fitri@fisip.unila.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Dra. Dian Kagungan, MH
b. NIDN	: 0015086903
c. SINTA ID	: 6041120
d. Program Studi	: Administrasi Publik
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Nana Mulyana, S.IP., M.Si.
b. NIDN	: 0015067115
c. SINTA ID	: 6156803
d. Program Studi	: Administrasi Publik
Anggota Peneliti (3)	
a. Nama Lengkap	: Dr. Novita Tresiana, M.Si.
b. NIDN	: 0018097205
c. SINTA ID	: 5975918
d. Program Studi	: Administrasi Publik
Lokasi kegiatan	: Provinsi Lampung
Luaran	: Proceeding Seminar Nasional dan Jurnal
Lama kegiatan	: 6 (enam) bulan

Biaya Penelitian :Rp. 10.000.000,-  
Sumber Dana :DIPA BLU FISIP UNILA Tahun Anggaran 2019

Bandar Lampung, 10 September 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Administrasi Publik



**Dr. Noverman Duadji, M.Si**  
NIP. 196911032001121002

Ketua Peneliti,



**Intan Fitri Meutia, Ph.D**  
NIP. 198506202008122001

Menyetujui,  
Ketua LPPM Unila

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama

**Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.**  
NIP. 196001191984031002

**Drs. Susetyo, M.Si.**  
NIP. 195810041989021001

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM  
PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

1. Judul Penelitian : STRATEGI *CYBER POLICING* DALAM PENERAPAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	INTAN FITRI MEUTIA, Ph.D.	Ketua	KEBIJAKAN PUBLIK	ADMINISTRASI PUBLIK	20
2.	Dra. DIAN KAGUNGAN, MH.	Anggota 1	KEBIJAKAN PUBLIK	ADMINISTRASI PUBLIK	15
3.	NANA MULYANA, S.IP., M.Si.	Anggota 2	KEBIJAKAN PUBLIK	ADMINISTRASI PUBLIK	15
4.	Dr. NOVITA TRESIANA, M.Si.	Anggota 3	KEBIJAKAN PUBLIK	ADMINISTRASI PUBLIK	15

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):  
Strategi *Cyber Policing* Kepolisian RI dalam penerapan *Collaborative Governance* dengan *stake holders* terkait.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Mei tahun 2019

Berakhir : bulan Oktober tahun 2019

5. Usulan Biaya : Rp. 10.000.000,-

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) : Provinsi Lampung

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya):

Kepolisian RI dilihat dari bentuk strategi *cyber policing* sebagai bentuk kebijakan untuk mencegah dan menangani kejahatan yang ada di masyarakat

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek):

Deskripsi dan Analisis terhadap rencanastrategis dalam upaya pencegahan dan penanganan bentuk kejahatan digital oleh Kepolisian RI melalui kolaborasi dengan *stakeholders* terkait..

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima Hibah Penelitian Unggulan ini (Prosiding dan Jurnal)

a) Seminar : SEFILA 3, Seminar Nasional FISIP Universitas Lampung Tahun 2019

b) Jurnal: *Administratio*, Jurusan Administrasi Publik FISIP UNILA edisi Januari 2020

## RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam perspektif penelitian kebijakan. Dimana penelitian ini akan mendeskripsikan secara ilmiah, rasional, empiris dan sistematis serta menganalisa pada strategis Strategi *Cyber Policing* dalam Penerapan *Collaborative Governance*. Pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan salah satu institusi yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang kompeten seharusnya memberikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik saat ini belum berhasil mewujudkan harapan-harapan masyarakat tersebut. Namun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang maksimal bukanlah hal yang mudah apabila tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan juga *stakeholder* terkait.

*Collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjabaran tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak. Kerjasama kolaboratif terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara para pihak tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasi walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama. Salah satu strategi *cyber policy* yang dijalankan oleh Polri adalah mengeluarkan program yang bernama *E-Policing*. Program tersebut menggunakan pola *collaborative governace*, dimana Polri bekerjasama dengan instansi lainnya termasuk masyatakat dalam menangani masalah *cyber crime*.

Lokasi penelitian adalah pada Polda Lampung. Di Provinsi Lampung, kasus cyber crime ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit II dengan pengembangan kasus yang terjadi Provinsi Lampung di bawah naungan Kepolisian Daerah Lampung, yang menangani terjadinya kasus kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang terjadi di Provinsi Lampung. Dengan adanya Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung maka seharusnya dapat menekan angka kejahatan khususnya kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Fakta tersebut dapat tercermin dalam data hasil pengaduan masyarakat atau Surat Laporan Polisi pada tahun 2013 sebanyak 16 kasus, 2014 sebanyak 25 kasus, dan 2015 sebanyak 31 kasus. Berbagai macam kasus *cyber crime* pengancaman, pembajakan, penipuan, pencurian, pelecehan, pemfitnahan, pemalsuan, penyebaran foto-foto dan video asusila yang tidak layak untuk yang masih di bawah umur media telekomunikasi dan jaringannya yang terdapat di Provinsi Lampung yang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, berdasarkan surat Laporan Polisi pada periode Januari 2013 sampai Desember 2015.

***Kata kunci: Strategi\_Cyber\_Policing\_Collaborative\_Governance***

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM</b> .....	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Urgensi Penelitian .....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Tentang Strategi .....	5
A. Pengertian Strategi .....	5
B. Perumusan Strategi .....	5
2.2 Tinjauan Tentang <i>Cyber Crime</i> .....	6
A. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	6
B. Jenis-jenis <i>Cyber Crime</i> .....	6
C. Metode Kejahatan <i>Cyber Crime</i> .....	7
2.3 <i>Collaborative Governance</i> .....	8
A. Pengertian <i>Collaborative Governance</i> .....	8
B. Alasan melakukan <i>Collaborative Governance</i> .....	9
C. Ukuran Keberhasilan <i>Collaborative Governance</i> .....	9
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>12</b>
3.1 Bagan Penelitian .....	12
3.2 Lokasi Penelitian .....	12
3.3 Struktur Tim Penelitian .....	13
<b>BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN</b>	
4.1 Luaran Wajib .....	14
4.2 Luaran Tambahan .....	14
<b>BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>15</b>
5.1 Gambaran Umum Kepolisian Daerah Lampung .....	15
5.2 Hasil Penelitian .....	27
5.3 Pembahasan & Analisis .....	33
<b>BAB 6. RENCANA ANGGARAN BIAYA</b> .....	<b>40</b>
<b>BAB 7. JADWAL</b> .....	<b>41</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Meningkatnya penggunaan internet maka di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, dan di sisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan. *Cyber crime* terjadi di Indonesia belum dapat dipastikan tanggal dan tahun kapan terjadinya, akan tetapi kasus *cyber crime* yang terjadi di Indonesia ialah pembajakan program komputer, *cracking*, penggunaan kartu kredit pihak lain, ponografi, pembajakan, penipuan, pencurian, pelecehan, pemfitnahan, pemalsuan, penyebaran foto-foto dan video asusila yang tidak layak untuk yang dibawah umur, penipuan yang dapat merugikan orang lain baik secara ekonomi dan sosial. Tercermin dari kejahatan tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan melihat pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

Di dalam suatu kasus kejahatan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujuk sebagai penindak atas terjadinya suatu kejahatan, termasuk kasus *cyber crime*, karena fungsi pokok kepolisian telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejak 2012 sampai April 2015, Subdit IT/*Cyber crime* telah menangkap 497 orang tersangka kasus kejahatan di

dunia maya. Dari jumlah itu, sebanyak 389 orang warga negara asing, dan 108 WNI. Kejahatan di dunia maya terus meningkat seiring dengan semakin banyak pengguna internet dan semakin baiknya koneksi internet di Indonesia. Kejahatan dalam jaringan di Indonesia saat ini, oleh para peretas atau *hacker* terhitung hingga Agustus 2015, telah merugikan negara mencapai Rp 33,29 miliar. Dalam kurun waktu tiga tahun silam tercatat ada 36,6 juta serangan kejahatan dalam jaringan. Nilai total kerugian sejak tiga tahun terakhir mencapai Rp 33,29 miliar. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Kepolisian Indonesia, Komisariss Besar Polisi Agung Setya. Dalam data *Security Threat 2013* juga menyebutkan Indonesia masih tergolong rentan serangan para peretas. Untuk menangani permasalahan peningkatan *cyber crime* tersebut, dibutuhkan suatu strategi dari pihak kepolisian. Program *E-Policing* merupakan salah satu strategi yang dikeluarkan. Program E-Policing tersebut menggunakan pola *Collaborative Governance*, dimana pihak kepolisian berkerjasama dengan masyarakat dalam mengurangi kasus *cyber crime*. Sehingga hubungan antara polisi dengan masyarakat bisa terjalin dalam 24 jam sehari dan 7 jam seminggu tanpa batas ruang dan waktu untuk selalu dapat saling berbagi informasi dan melakukan komunikasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana *Strategi Cyber Policing* dalam Penerapan *Collaborative Governance*?

### **1.3 Tujuan Khusus**

1. Menganalisis *Strategi Cyber Policing* dalam Penerapan *Collaborative Governance*.
2. Publikasi Jurnal terindeks scopus

### **1.4 Urgensi Penelitian**

Upaya yang dilakukan oleh Polri melalui Program *E-Policing* ini dapat dimaknai juga sebagai mekanisme akses informasi publik yang efisien, cepat dan terjangkau terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharapkan melalui pengelolaan informasi yang baik sebagai salah satu wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Di titik inilah, sejalan dengan konteks pelayanan informasi publik, diperlukan sistem layanan informasi publik yang memadai. Sistem informasi itu untuk meningkatkan aksesibilitas atau kemudahan memperoleh informasi, kualitas informasi, dan pengembangan manajemen khususnya di Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Konsep *E-Policing* yang dilaksanakan oleh Polri bukan berarti menghapus cara-cara manual yang masih efektif dan efisien dalam menjalin kedekatan dan persahabatan antara polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. *E-Policing* menyempurnakannya, meningkatkannya sehingga polisi benar-benar menjadi sosok yang profesional, cerdas, bermoral dan modern sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan sekaligus. *E-Policing* dapat dipahami sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian yang berbasis elektronik yang berarti membangun sistem-sistem yang terpadu, terintegrasi, sistematis dan saling

mendukung, ada harmonisasi antar fungsi/bagian dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.

Di Provinsi Lampung, kasus *cyber crime* ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit II dengan pengembangan kasus yang terjadi Provinsi Lampung di bawah naungan Kepolisian Daerah Lampung, yang menangani terjadinya kasus kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang terjadi di Provinsi Lampung. Dengan adanya Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Lampung maka seharusnya dapat menekan angka kejahatan khususnya kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Fakta tersebut dapat tercermin dalam data hasil pengaduan masyarakat atau Surat Laporan Polisi pada tahun 2013 sebanyak 16 kasus, 2014 sebanyak 25 kasus, dan 2015 sebanyak 31 kasus. Berbagai macam kasus *cyber crime* pengancaman, pembajakan, penipuan, pencurian, pelecehan, pemfitnahan, pemalsuan, penyebaran foto-foto dan video asusila yang tidak layak untuk yang masih di bawah umur media telekomunikasi dan jaringannya yang terdapat di Provinsi Lampung yang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, berdasarkan surat Laporan Polisi pada periode Januari 2013 sampai Desember 2015.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Strategi**

#### **A. Pengertian Strategi**

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategik bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. (Siagian, 2004:23)

#### **B. Perumusan Strategi**

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu:

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.

3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. (Hariadi, 2005)

## **2.2 Tinjauan tentang *Cyber Crime***

### **A. Pengertian *Cyber Crime***

*Cyber Crime* adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian *cyber crime* adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian *cyber crime* adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer.

Cyber crime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi.

### **B. Jenis-Jenis *Cyber Crime***

1. Akses Ilegal (*Unauthorized Access*)
2. Menyebarkan Konten Ilegal (*Illegal Contents*)

3. Hacking dan Cracking
4. Pemalsuan Data (*Data Forgery*)
5. Penyalahgunaan Kartu Kredit (*Carding*)
6. Pencurian Data (*Data Theft*)
7. Memata-Matai (*Cyber Espionage*)
8. CyberSquatting
9. Cyber Typosquatting

### **C. Metode Kejahatan *Cyber Crime***

#### 1. Password Cracker

Ini adalah suatu tindakan mencuri password orang lain dengan menggunakan suatu program yang dapat membuka enkripsi password. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan suatu sistem pengamanan password.

#### 2. Spoofing

Spoofing adalah tindakan memalsukan data atau identitas seseorang sehingga pelaku (hacker) dapat melakukan login ke dalam suatu jaringan komputer layaknya user yang asli.

#### 3. DDoS (Distributed Denial of Service Attacks)

Ini adalah serangan yang dilakukan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet yang dilakukan oleh seorang hacker/ attacker. Serangan DDoS akan menghabiskan sumber daya (resource) yang ada pada suatu komputer atau server hingga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan benar.

#### 4. Sniffing

Sniffing adalah bentuk cyber crime dimana pelaku mencuri username dan password orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku kemudian dapat memakai akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban atau merusak/ menghapus data milik korban.

#### 5. Destructive Devices

Ini adalah program atau software berisi virus dimana tujuannya adalah untuk merusak atau menghancurkan data-data di dalam komputer korban. Beberapa yang termasuk dalam program ini adalah Worms, Trojan Horse, Nukes, Email Bombs, dan lain-lain.

### **2.3 Collaborative Governance**

#### **A. Pengertian Collaborative Governance**

Kerjasama kolaboratif terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara para pihak tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasi walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011, hlm. 251). *Collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjabaran tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak.

*Collaborative Governance* menekankan enam kriteria yaitu : (1) forum ini diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga, (2) peserta dalam forum termasuk aktor swasta, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan

bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi publik, (4) terorganisir, (5) forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus dan (6) fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik (Ansell & Gash, 2007, hlm. 6).

### **B. Alasan melakukan *Collaborative Governance***

Secara umum *collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan berikut:

1. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi;
2. Konflik antar kelompok kepentingan bersifat laten dan sulit diredam;
3. Upaya mencari cara baru untuk mencapai legitimasi politik.

Alasan organisasi melakukan *collaborative governance* adalah:

1. Perubahan sosial, saat ini merupakan era reformasi masyarakat dan fase informasi mengakibatkan struktur dapat menyebar di seluruh lingkup;
2. Masalah yang dihadapi pemerintah saat ini tidak akan dapat dikelola secara efisien jika hanya mengandalkan satu organisasi. Pemerintah membutuhkan mekanisme berbeda dan bersifat fleksibel. Kolaborasi antara berbagai sektor dibentuk mengatasi masalah (McGuire dalam Sabaruddin, 2015, hlm. 34).

### **C. Ukuran Keberhasilan *Collaborative Governance***

*Item* penting dijadikan tolak ukur keberhasilan *collaborative governance*, yaitu :

1. Tipe *networked structure* (jenis struktur jaringan), terbagi dalam :
  - a) *Self governance*, struktur tidak terdapat entitas administratif namun *stakeholders* berpartisipasi dalam *networks*.

b) *Lead organization*, yaitu adanya entitas administratif dan manajer yang melakukan jaringan sebagai penyedia layanan.

c) *Model network administrative organization*, ditandai adanya entitas administratif secara tegas yang dibentuk untuk mengelola program bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya digaji.

2. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan)

Mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan harus ada dan alasan tersebut karena perhatian dan komitmen mencapai tujuan positif.

3. *Trust among the participals* (adanya saling percaya)

Kepercayaan dan rasa hormat adalah penting jika kolaborasi ingin sukses, komunikasi dan kepercayaan sangat penting karena merupakan tipe dan indikasi efisiensi kepercayaan diantara kelompok yang terlibat.

4. *Governance*

Termasuk: (1) adanya saling percaya diantara para pelaku, (2) ada batas-batas siapa yang boleh terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat, (3) aturan main sangat jelas yang disepakati bersama, (4) kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan.

5. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan)

Tersedianya standar ukuran ketentuan prosedur yang jelas.

6. *Distributive accountability / responsibility* (pembagian akuntabilitas / responsivitas). Mengenai *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya) dan pembuatan keputusan kepada seluruh anggota dapat dipertanggungjawabkan.

7. *Information sharing* (berbagi informasi)

Yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang) dan keterbatasan akses bagi bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak.

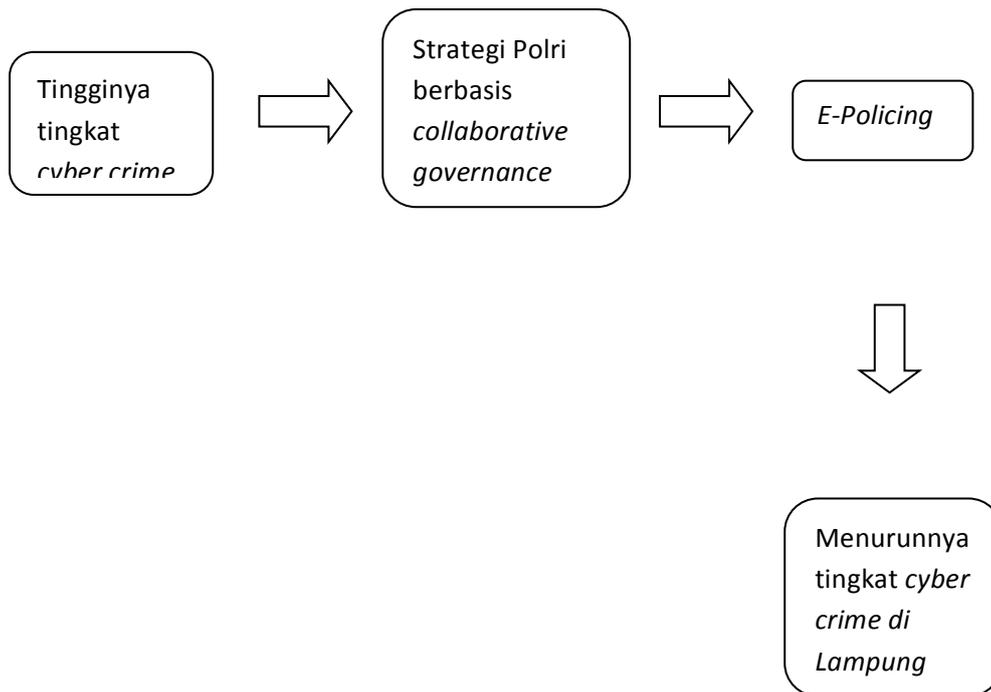
8. *Access to resources* (akses terhadap sumberdaya)

Ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumberdaya diperlukan mencapai tujuan (Goldsmith & Kettl, 2009, hlm. 1-2).

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Bagan Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan dengan mengikuti kerangka berpikir paradigmatik sebagai berikut:



### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada POLDA Lampung.

### 3.3 Struktur Tim Penelitian

Tabel 1. Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas dalam Penelitian

No.	Nama NIDN SINTA	Bidang Ilmu Alokasi Waktu (jam/waktu)	Uraian Tugas
1.	Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., P.hD (0020068502) (5975146)	Kebijakan Publik 20 jam/minggu	Ketua proyek/koordinator penelitian dalam kegiatan observasi dan kunjungan lapang, memimpin fgd, lokaka, penyusunan strategi, menyelesaikan log book penelitian, laporan kemajuan laporan akhir, implementasi strategi, dan produk penelitian, bertanggungjawab dalam kegiatan monev dan publikasi jurnal terakreditasi Internasional serta bertanggungjawab dalam administrasi keuangan penelitian.
2.	Dra. Dian Kagungan, MH (0015086903) (6041120)	Pengantar Ilmu Hukum 15 jam/minggu	Wakil ketua penelitian sekaligus bendahara, membantu Tim mengurus perizinan, observasi lapang dan kunjungan lapang, fgd, lokaka, perumusan strategi, membantu penyusunan proposal kemajuan, log book, dan laporan akhir
3.	Nana Mulyana, S.IP, M.Si (0015067115) (6156803)	Hukum Administrasi Negara 15 jam/minggu	Sekretaris penelitian membantu Tim mengurus perizinan, observasi lapang dan kunjungan lapang, fgd, lokaka, perumusan strategi, membantu penyusunan proposal kemajuan, log book, dan laporan akhir
4.	Dr. Novita Tresiana, M.Si. (0018097205) (5975918)	Manajemen Publik 15 jam/minggu	Anggota penelitian membantu Tim mengurus perizinan, observasi lapang dan kunjungan lapang, fgd, lokaka, perumusan strategi, membantu penyusunan proposal kemajuan, log book, dan laporan akhir

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019

## **BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN**

### **4.1 LUARAN WAJIB**

Luaran penelitian ini terkait dengan bidang unggulan yang dipilih meliputi;  
Proceeding Seminar Nasional dan Jurnal

### **4.2 LUARAN TAMBAHAN**

**Seminar:** SEFILA 3, FISIP UNILA

**Jurnal:** Jurnal Administratio, Jurusan Administrasi Publik, FISIP UNILA

## **BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **5.1. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Lampung**

Pengertian Kepolisian dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Kemudian pada Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian pada Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Polda Lampung di atas, selanjutnya dapat diuraikan tugas pokok dan fungsi unsur pengawas dan pembantu pimpinan selaku Unsur Pelaksana Tugas Pokok pada Polda Lampung sebagai berikut :

#### **A. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)**

SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolda di bawah koordinasi

dan arahan Roops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. SPKT bertugas :

- a. memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan; dan
- b. menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kemudian dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, SPKT menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi 70 Izin Usaha Jasa Pengamanan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- b. pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi Tindakan Pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, Turjawali dan pengamanan;
- c. pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial) dan surat;

- d. penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolda melalui Roops.

SPKT terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin); dan
- b. Kepala Siaga SPKT (Ka Siaga SPKT).

#### **B. Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam)**

Ditintelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditintelkam dipimpin oleh Dirintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirintelkam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirintelkam, yang bertanggung jawab kepada Dirintelkam. Ditintelkam bertugas :

- a. membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan 71 pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional dan peringatan dini (early warning);
- b. memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam. Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditintelkam menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda;

b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;

c. pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah;

d. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polda;

e. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan

f. pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan 72 sosial atau politik masyarakat dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Ditintelkam terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);

b. Bagian Analisis (Baganalisis);

- c. Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin);
- d. Seksi teknologi Intelijen (Sitekintel);
- e. Seksi Sandi (Sisandi); dan
- f. Sub Direktorat (Subdit).

### **C. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)**

Ditreskrimum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimum dipimpin oleh Dirreskrimum yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimum yang bertanggung jawab kepada Dirreskrimum. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Ditreskrimum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum;

e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda; dan f. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.

Ditreskrimum terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik);
- d. Seksi Identifikasi (Siident); dan
- e. Sub Direktorat (Subdit).

#### **D. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).**

Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Dirreskrimsus. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- b. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- c. pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Ditreskrimsus terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik);
- d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS; dan
- e. Sub Direktorat (Subdit).

#### **E. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas).**

Ditbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditbinmas dipimpin oleh Dirbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirbinmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirbinmas yang bertanggung jawab kepada Dirbinmas. Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### **F. Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara)**

Ditsabhara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditsabhara dipimpin oleh Dirsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirsabhara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirsabhara yang bertanggung jawab kepada Dirsabhara. Ditsabhara bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.

#### **G. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)**

Ditlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditlantas dipimpin oleh Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirlantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirlantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas. Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas.

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Ditlantas menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;
- d. pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas.

Ditlantas terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Subditdikyasa);
- d. Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subditbingakkum);

- e. Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident);
- f. Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel);
- g. Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR); dan
- h. Satuan Patroli dan Pengawasan (Sat Patwal)

#### **H. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit).**

Ditpamobvit merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditpamobvit dipimpin oleh Dirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirpamobvit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Dirpamobvit. Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan 80 di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditpamobvit menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan anev serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpamobvit;
- b. pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus;
- c. pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus;

- d. pengamanan kementerian dan lembaga negara termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus; dan
- e. pengamanan perwakilan negara asing termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus.

Ditpamobvit terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Subdirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster);
- d. Subdirektorat Pariwisata (Subditwisata);
- e. Subdirektorat Lembaga Negara (Subditlemneg); dan
- f. Subdirektorat Perwakilan Asing (Subditkilas).

#### **I. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair)**

Ditpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditpolair dipimpin oleh Dirpolair yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpolair yang bertanggung jawab kepada Dirpolair. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Kemudian

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditpolair menyelenggarakan fungsi :

- a. pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;
- b. pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
- c. pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
- d. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;
- e. pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan
- f. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

Ditpolair terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Subdirektorat Penegakkan Hukum (Subditgakkum);
- d. Satuan Patroli Daerah (Satrolda);
- e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan); dan
- f. Kapal.

## **J. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti).**

Dittahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Dittahti dipimpin oleh Dirtahti yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. Dirtahti dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirtahti yang bertanggung jawab kepada Dirtahti. Dittahti bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dittahti menyelenggarakan fungsi : a. pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, yang meliputi memeriksa fasilitas ruang tahanan secara berkala, mengendalikan dan memonitor jumlah tahanan, serta melaporkan jumlah tahanan; b. pelayanan kesehatan dan pembinaan tahanan; 83 c. pengamanan dan administrasi barang bukti; dan d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Dittahti. Dittahti terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); b. Subdirektorat Pengamanan Tahanan (Subditpamtah); c. Subdirektorat Pemeliharaan dan Perawatan Tahanan (Subditharwattah); dan d. Subdirektorat Barang bukti (Subditbarbuk).

## **B. Hasil Penelitian**

Perubahan sosial terus menerus terjadi. Peluang, sekaligus tantangan secara inheren berada dalam proses perubahan yang tercipta. Birokrasi sebagai organisasi publik, pun perlu memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan tersebut. Termasuk lembaga kepolisian. Saat ini modus kriminalitas pun semakin

berkembang, salah satunya *cyber crime*, yakni aktivitas kriminal yang dilakukan di dunia siber. *Cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan akses internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki aturan terkait tindak pidana siber dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, tentunya regulasi semata tidaklah mencukupi. Perlu ada upaya lebih yang dilakukan lembaga kepolisian di Indonesia untuk melaksanakan *cyber policing* sebagai benteng dalam menghadapi *cyber crime* yang sudah mulai meningkatnya. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membangun *e-policing*.

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kerjasama yang kuat dengan banyak stakeholders, mengingat *cyber crime* pun bersifat berjejaring. Dalam konteks ini, Polda-Polda di daerah pun perlu melakukan upaya ke jalan kerjasama, bahkan kolaborasi. Tidak terkecuali bagi Polda Lampung. Bahkan, Polda Lampung pernah menjadi korban *cyber crime*. Website yang dikelola Polda Lampung pernah diretas dan cukup membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya.

Tahun politik 2019 yang telah dilalui bersama memiliki dampak tersendiri bagi lembaga kepolisian di Indonesia. Beberapa waktu ini, kepolisian banyak disibukkan oleh penanganan masalah penyebaran *hoax* dan *hate speech* yang

menjalar di dunia digital Indonesia. Pihak Polri mencatat pada tahun 2018 setidaknya terdapat 3884 kasus *hoax* dan *hate speech* yang sedang dalam proses penyidikan, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 1254 kasus. *Hoax* dan *hate speech* disebar oleh akun-akun media sosial yang asil maupun yang *anonymous*. Materi sebaran *hoax* bisa bersifat *black campaign* untuk menjatuhkan salah satu calon pada Pilpres 2019. Sampai Desember 2018 sudah tercatat 90 orang yang telah menjadi tersangka (Golose, 2019). Fenomena *hoax* ini juga secara tidak langsung dapat merugikan pemerintah secara umum, karena mengingat salah satu calon untuk Pilpres 2019 adalah inkumben. Informasi-informasi yang tidak benar dalam sebaran *hoax* dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara tidak proposional.

Kasus cyber crime yang ditangani oleh Polda Lampung pun dalam beberapa waktu terakhir banyak menangani kasus penyebaran *hoax* dan *hate speech*. Karena kasus tersebut seakan-akan telah menjalar di beberapa daerah, tidak terkecuali di Provinsi Lampung. Kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) terkait pemilihan umum yang terjadi beberapa waktu lalu di Lampung contohnya, yakni *hoax* server KPU disetting. kasus tersebut diperkarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polisi langsung bergerak menangkap tersangka RD yang juga berprofesi sebagai dokter. Humas Polda Lampung membenarkan penangkapan tersangka sebagai kreator dan buzzer dalam kasus tersebut. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa akun media sosial, ponsel, dan *simcard telephone*.

“Ya benar Tim Siber Bareskrim Mabes Polri mengamankan satu tersangka di Lampung berinisial RD yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga

*sekaligus dokter. Tersangka sempat diperiksa Polda Lampung. Sudah dibawa ke Mabes Polri.” ujar Kabid Humas Polda Lampung AKBP Zahwani Pandra Arsyad (8/4/2019).*

Adapun contoh kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) lainnya, yakni maraknya isu penculikan yang terjadi di Lampung, fenomena tersebut terjadi hampir bersamaan di seluruh daerah di Indonesia. Penyebabnya yaitu pesan berantai di media sosial dan aplikasi pesan singkat.

*”Kami sudah mengecek jajaran polres di Lampung. Kasus penculikan di Lampung terhadap anak-anak itu tidak ada. Tidak ada laporan yang masuk. Jadi yang katanya modus pura-pura menyamar jadi orang gila sudah kita lidik (penyelidikan, Red) dan faktanya tidak ada” kata Direktur Ditreskrimum Polda Lampung Kombes Bobby Marpaung di ruang Bidhumas Polda Lampung (5/11/2018)*

Kasus ujaran kebencian di Provinsi Lampung akhir-akhir ini mengalami peningkatan, misalnya kasus ujaran kebencian terhadap presiden Joko Widodo dan Polri. Polda Lampung menangkap seorang pria warga Desa Fajar Agung, Jati Agung, Lamsel (27/6/2019). yang menyebarkan ujaran kebencian menggunakan tiga akun yang menyebut presiden Jokowi sebagai komunis dan juga mengatakan Polri gila. Penangkapan tersebut berawal dari informasi mabes polri yang kemudian ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan dilakukan penangkapan sesuai surat perintah. Polda Lampung juga menangkap warga Desa Way Kalam, Penengahan, Lampung Selatan, kasus penghinaan terhadap Kapolri (31/5/2019). tim cyber patrol Unit Cyber Crime Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Lampung

menemukan bahwa pelaku mengunggah ujaran berisi hujatan dan ancaman kepada Kapolri melalui akun *Facebook* Ali Faqih Al Kalami pada Senin (29/5) pukul 22.15 WIB.

Kasus ujaran kebencian yang memuat SARA juga terjadi di Lampung. Polda Lampung menangkap warga Sidomulyo, Lampung Selatan dalam kasus penghinaan terhadap calon kepala daerah (7/5/2018). Tersangka mengunggah konten tulisan yang bernuansa SARA dan ujaran kebencian yang dilakukan pada 21 April 2018. Polda Lampung juga menangani kasus ujaran kebencian terhadap Suku Lampung, petugas Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung telah menangkap Deni Putra Kamadia alias Ocank (33). Tersangka pengunggah ujaran kebencian terhadap Suku Lampung melalui akun facebook palsu Uyung Mustofa. Polisi menangkap tersangka di rumahnya di Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa barat (15/9/2017).

Kasus cyber crime terkait pembobolan ATM juga melibatkan oknum polisi berpangkat Brigpol di Lampung. Oknum tersebut terbukti melakukan pembobolan di salah satu ATM di Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung, Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Zahwani Pandra Arsyad (9/4/2019). *Cyber crime* juga menyoar pada kasus pornografi. Kasus penyebaran foto dan video pornografi ditangani oleh petugas cyber crime Polda Lampung pada September tahun 2017. Petugas menangkap dua pemuda Kemiling, Bandar Lampung dengan menyebarkan foto dan video yang berbau pornografi mantan pacarnya di media sosial.

“Mereka menyebarkan foto maupun video lantaran keduanya sakit hati kepada mantan pacarnya karena ingin mengakhiri hubungannya. Jadi korban ini adalah seorang mahasiswa dan seorang pekerja. Saat korban tidak menanggapi ancaman mantan pacarnya, kemudian kedua tersangka tetap menyebarkan foto dan videonya di akun instagram. Korban yang tidak terima, kemudian melaporkan kepada kami” Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung Kombes Rudi Setiawan, Selasa (5/9/2017).

Dalam kesempatan ini, peneliti akan mencoba untuk menelusuri pelaksanaan *cyber policing* Polda Lampung dari perspektif *collaborative governance*. Paradigma *collaborative governance* relevan sebagai alat analisis dalam aktivitas *cyber policing*. Mengingat, seperti yang disinggung sebelumnya, sifat *cyber crime* bisa berjejaring luas, bahkan bisa lintas negara. Implikasinya, kolaborasi diperlukan dalam *cyber policing*.

Pada dasarnya, penanganan kasus *cyber crime* dalam hal ini proses penyidikan pada umumnya sama dengan penanganan kasus konvensional yang lain. Misalnya, terkait pengumpulan barang bukti, pengeledahan dan proses penyelesaiannya. Namun, dalam proses penangkapan, kepolisian perlu berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti saksi ahli untuk memperoleh kepastian. Oleh karena itu, aktivitas penanganan *cyber crime* tidak bisa dikerjakan secara mono-organisasi.

Kendala mendasar yang sering terjadi dalam proses penyidikan ini adalah kurangnya saksi ahli baik saksi ahli gambar maupun saksi ahli bahasa, serta tidak

adanya unit yang secara khusus menangani kasus cyber crime. oleh karena itu sangat dibutuhkan peran saksi ahli dalam penanganan kasus cyber crime. Belum lagi, untuk konteks Polda Lampung, sumber daya manusia (SDM) masih menjadi kendala tersendiri. Polda Lampung belum memiliki SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang IT (Anugrah, 2017), hal ini tentunya kendala serius yang perlu direspon secara proaktif oleh pihak kepolisian.

Hasil studi Anugrah (2017) menginformasikan ada 75 kasus tindak pidana cyber crime yang terselesaikan 38%, dan yang masih dalam penyelidikan dan penyidikan 61% kasus. Catatan ini bisa dikatakan kinerja yang belum optimal. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dalam menambah dan meningkatkan SDM pada Ditreskrimsus Polda Lampung yang sesuai dengan kompetensi dalam bidang IT.

Di tahun 2018 pun kasus cyber crime yang ditangani Polda Lampung angkanya cukup tinggi. Data yang dilansir Polda Lampung menginformasikan total ada 84 kasus *cyber crime* yang memang didominasi oleh pelanggaran UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dari 84 kasus tersebut sebanyak 75 kasus telah diselesaikan. Sementara untuk tahun 2017 total ada 58 kasus yang masuk, dan hanya 19 perkara yang selesai.

### **C. Pembahasan & Analisis**

Collaborative Governance adalah salah satu langkah untuk merespon kebutuhan stakeholders terlibat dalam penyelesaian masalah publik. Terma “terlibat” dalam Collaborative Governance memiliki makna kesatuan, hal yang jauh lebih utuh

daripada kata “dilibatkan”. Dalam studi ini, peneliti mengadaptasi proses *collaborative governance* yang dikemukakan Goldsmith & Kettl (2009:1-2) yang menyatakan kriteria keberhasilan sebuah jaringan kolaborasi, yaitu *networked structure*, *Commitment to a common purpose*, *Trust among the participals*, *Governance*, *Access to authority*, *Distributive accountability/responsibility*, *Information sharing*, dan *Access to resources*.

*Collaborative governance* merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Namun, instansi tersebut tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Tindakan *Collaborative governance* dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai sulit tercapainya sebuah tujuan jika hanya dilakukan oleh satu organisasi yang bertindak sendiri. Kerjasama antar organisasi dengan tujuan yang telah disepakati bersama melakukan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak. Dalam studi ini, peneliti mengadaptasi model proses *collaborative governance* yang dikemukakan oleh ansell dan gash (2007:15).

#### ***A. Face to Face Dialog***

Proses pertemuan tatap muka secara langsung dalam satu tempat dan waktu yang sama adalah langkah awal dalam merintis *collaborative governance*. Proses dari dialog ini menghasilkan kesepakatan yang bisa menjadi komitmen nilai dan pijakan bersama dalam proses kolaborasi. Dalam konteks *cyber policing*, Polda Lampung belum melakukan institusionalisasi dalam proses *face to face dialoge* tersebut. Ada pun pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak pihak masih

bersifat *eventually*. Ketika ingin menghadirkan masyarakat, lebih bersifat sosialisasi.

Salah satu langkah yang pernah dibangun oleh Polda Lampung adalah dengan membuat *Cyber Police Community* di Polda Lampung. Polda Lampung menilai bahwa perlu mengajak para dosen, mahasiswa serta pakar untuk berkolaborasi membantu polisi dalam penanganan *cyber crime* di Lampung. Setidaknya, ada empat tujuan dari pendirian *Cyber Police Community* ini, yaitu 1) wadah berbagi informasi dan komunikasi antara komunitas *Cyber Police* di Lampung, 2) sebagai forum sosialisasi tentang *cyber crime* kepada masyarakat, 3) mendorong mahasiswa yang memiliki kompetensi IT untuk membuat software dan aplikasi yang dapat mendeteksi *cyber crime*, dan 4) membantu Polda Lampung untuk menindak *Cyber Crime*.

Polda Lampung juga melibatkan Tim IT IBI Darmajaya dalam menangani kejahatan ITE yang dilakukan sejak tahun 2012. Polda Lampung menilai pelibatan tersebut perlu dilakukan oleh bagian yang menguasai dan ahli di bidang IT guna membantu untuk mengamati dan menganalisa kejahatan ITE. Lebih jauh dikatakan bahwa Tim IT menangani kasus ITE sebanyak 4-5 kasus kejahatan dibidang ITE setiap tahunnya. Kasus yang ditangani, antara lain pornografi, pencemaran nama baik, dan ancaman yang dilakukan menggunakan perangkat IT.

Sebagai langkah awal, upaya ini penting. Pada proses ini kriteria keberhasilan *collaborative governance*, yakni *networked structure* dan *Commitment to a common purpose* memang telah terpenuhi, namun sayangnya komunitas yang

telah didirikan tersebut belum berjalan secara kokoh. Sisi kolaborasi dengan *stakeholder* tersebut masih minim, ini terlihat dalam pelibatan jumlah penanganan kasus yang masih sedikit.

### **B. Trust Building**

Terbentuknya kepercayaan antar organisasi yang terlibat tidak lepas dari terjalinnya komunikasi yang *intens*. Kepercayaan akan terbangun seiring dengan keterlibatan pihak-pihak saat melakukan *collaborative*, sehingga satu sama lain akan membuktikan bahwa diri mereka dapat dipercaya. Dalam konteks *cyber policing*, keterlibatan antara Polda Lampung dengan *Cyber Police Community* dan Tim IT IBI Darmajaya dalam membantu Polda Lampung untuk menindak *cyber crime*.

Komunikasi yang terjalin secara intens antara Polda Lampung dengan *Cyber Police Community* dan Tim IT IBI Darmajaya dalam penanganan kasus *cyber crime* berdampak pada keterbukaan antara masing-masing *stakeholder* dalam memberikan perspektifnya. Pada proses ini, kriteria keberhasilan *collaborative governance*, yaitu *Trust among the participals* telah terpenuhi dengan adanya keterlibatan *stakeholder* dalam membantu Polda Lampung mensosialisasikan *cyber crime* kepada masyarakat dan penanganan kasus-kasus *cyber crime*.

### **C. *Comitment to Process***

Adanya komitmen dalam proses *collaborative governance* mampu menghilangkan penghambat yang sering muncul karena perbedaan karakteristik dan kepentingan antar aktor. Komitmen juga berkaitan dengan motivasi bagi para aktor untuk dapat mengimplementasikan *collaborative governance*. Proses kolaborasi dalam *cyber policing*, komitmen masing-masing *stakeholder* antara Polda Lampung dengan *Cyber Police Community* dan Tim IT IBI Darmajaya memiliki tujuan yang sama dalam menangani kasus *cyber policing*.

Sebagai upaya komitmen masing-masing *stakeholder*, kepercayaan menjadi isu penting dalam proses *collaborative governance*, kesamaan pemahaman dan legitimasi internal maupun eksternal menjadi prasyarat penting agar berjalan dengan baik. Pada proses ini, peentuan tolak ukur keberhasilan *collaborative governance*, yakni *Trust among the participals* dan *Access to authority* dengan adanya standar prosedur yang jelas dalam hal ini *stakeholder* yang terlibat dituntut untuk dapat dipercaya, dan kredibel dalam tujuan bersama. *stakeholder* harus menyadari rasa ketergantungan antar aktor yang akan menciptakan kolaborasi berkelanjutan.

### **D. *Shared Understanding***

Saling memahami adalah kondisi dimana para *stakeholder* menyetujui tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. *Shared understanding* merupakan kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan untuk mengatasi masalah. Dalam proses *collaborative governance*, para *stakeholder* harus

menyamakan pemahaman atau persepsi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam proses *collaborative governance* berkaitan dengan *cyber policing* yaitu dengan membangun kesepemahaman bersama untuk menangani *cyber crime*.

*Shared understanding* atau saling memahami dilakukan dengan saling memberikan informasi dalam hal ini kasus *cyber crime* yang terjadi atau ditangani oleh Polda Lampung dengan berkolaborasi dengan *Cyber Police Community* dan Tim IT IBI Darmajaya. Hal tersebut dilakukan untuk membantu Polda Lampung menangani kasus-kasus *cyber crime* yang memerlukan keahlian dalam bidang IT. Pada proses *collaborative governance* ini, *Information sharing* menjadi tolak ukur keberhasilan proses kolaborasi. *Information sharing* memberikan kemudahan para stakeholder mendapatkan informasi atau memberikan informasi, sehingga informasi yang jelas, dan kemudahan akses informasi akan menjadikan *collaborative governance* berjalan dengan baik.

#### **E. *Intermediate Outcome***

*collaborative governance* lebih mungkin terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi relatif konkrit dan ketika kolaborasi memiliki tingkat keberhasilan yang besar. Dalam proses *intermediate outcome* diartikan sebagai hasil proses yang penting untuk membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan tersebut akan memberikan *feedback* kedalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen.

*Cyber policing* memerlukan proses *collaborative governance* dalam penanganan *cyber crime*. Hal tersebut dilakukan karena dalam kasus-kasus *cyber crime* memerlukan sebuah penanganan khusus yang melibatkan ahli dalam bidang IT. Polda Lampung melibatkan peran *Cyber Police Community* dan Tim IT IBI Darmajaya untuk membantu penanganan kasus-kasus *cyber crime*. Proses kolaborasi tersebut membuahkan hasil dalam penanganan kasus yang berhasil diselesaikan. Kasus-kasus *cyber crime* yang berhasil ditangani pada tahun 2017 sebesar 19 kasus dari 58 kasus yang masuk, sedangkan tahun 2018 mengalami peningkatan penyelesaian penanganan kasus sebanyak 75 kasus dari 84 kasus yang masuk. Penangan kasus yang melibatkan Tim IT IBI Darmajaya sebanyak 4-5 kasus setiap tahunnya.



Gambar 1. *Collaborative Process* dalam *Cyber Policing* Polda Lampung

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2019).

## BAB 6. RENCANA ANGGARAN BIAYA

No.	Nama	Volume	Satuan	Biaya	Jumlah Biaya
<b>1</b>	<b>Peralatan dan Bahan Habis Pakai</b>				
	Kertas A4 80 gram	5	rim	Rp 45.500	Rp 227.500
	Goody bag	25	buah	Rp 15.000	Rp 375.000
	Noteblock	25	buah	Rp 3.500	Rp 87.500
	Ballpoint	3	lusin	Rp 22.000	Rp 66.000
	Spidol Boardmarker	3	buah	Rp 8.100	Rp 24.300
	Sewa Kamera	4	hari	Rp 100.000	Rp 400.000
	Sewa LCD	1	paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	Sewa Tape Recorder	4	hari	Rp 100.000	Rp 400.000
	Banner	6	meter	Rp 50.000	Rp 300.000
	Flash Disk 16gb	3	buah	Rp 87.500	Rp 262.500
	Cartridge Hitam	1	buah	Rp 348.700	Rp 348.700
	Cartridge Warna	1	buah	Rp 408.500	Rp 408.500
<b>2</b>	<b>Travel Expenditure</b>				
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental Roda 4	4	mobil/hari	Rp 500.000	Rp 2.000.000
	Makan Siang FGD	30	kotak	Rp 30.000	Rp 900.000
	Transport (5 orang x 4hari)	20	orang/hari	Rp 110.000	Rp 2.200.000
		<b>TOTAL</b>			<b>Rp 10.000.000</b>

## BAB 7. JADWAL

Kegiatan penelitian ini meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1	Persiapan/penyusunan proposal/rencana kegiatan	X							
2	Pengumpulan data pra riset (observasi, dokumentasi, dan wawancara awal)	X							
3	Pengumpulan data lapangan lanjutan		X	X					
4	Pengolahan data				X	X			
5	Pembuatan draft laporan penelitian						X	X	
6	Seminar hasil penelitian - Prosiding & Jurnal							X	X
7	Final report								X

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2011. *Collaborative Governance (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anugrah, S. F. (2017). Evaluasi Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kasus Cyber Crime di Provinsi Lampung (Studi Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung). Universitas Lampung.
- Arisman. 2004. *Collaborative*. Buku Kedokteran EGC. Jakarta.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Golose, P. R. (2019). Strategi Penanganan Firehose of Falsehood pada Era Post-Truth. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(1), 6–15.
- Handy, F. 2010. *Manajemen Startegi*. Jakarta: Pustaka Bunda.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Kebijakan Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pudjiadi. S. 2005. *Cyber Crime*. Edisi Keempat FKUI. Jakarta.
- R. Bintaro. 2003. Kemitraan dan Kolaborasi pemerintahan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, A. dan Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian kebidanan*. Jakarta :Nuha Medika.
- Soetjningsih. 2012. *Kejahatan Terstruktur*. Jakarta:EGC
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Supariasa, I.D.N. 2003. *Penelitian Cyber Crime*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- V. WiratnaSujarweni, 2014. *Metodologi Penelitian*.,Yogyakarta : PT Pustaka Baru
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintah Desa/Marga*.Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.

Wrihatnolo,Randy.R, dan Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Jurnal :

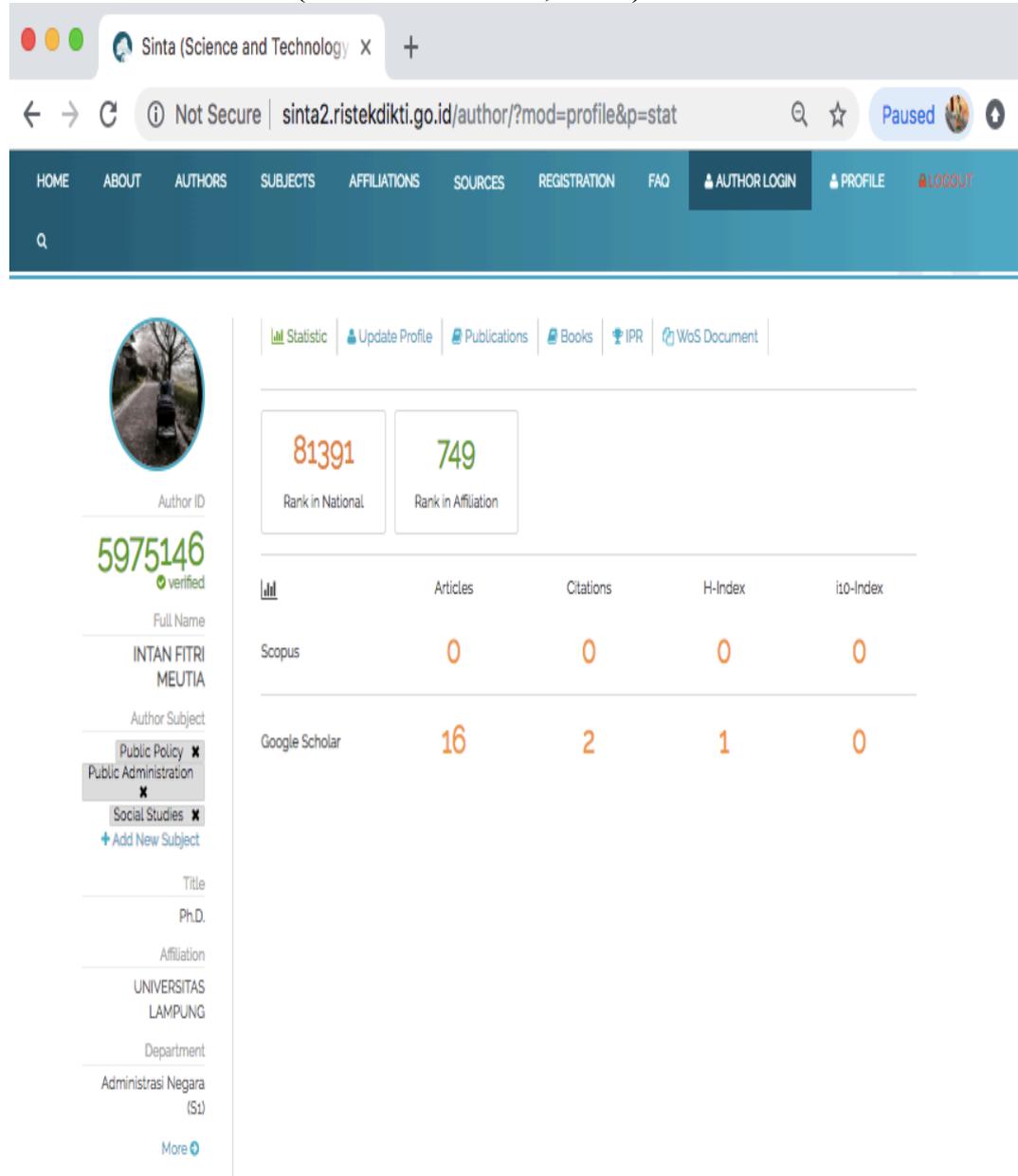
Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

Sumber Online:

- <https://nasional.okezone.com/read/2017/12/21/337/1833784/tahun-2017-polisi-tangani-1-763-kasus-kejahatan-siber>
- <https://regional.kompas.com/read/2018/05/08/07452221/menghina-calon-kepala-daerah-di-lampung-suyanto-ditangkap-polisi>
- <https://www.teraslampung.com/hina-suku-lampung-pemilik-akun-facebook-uyung-mustofa-ditangkap-polda-lampung/>
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/107102-polda-lampung-amankan-tersangka-penghinan-kapolri>
- <http://lampungnews.com/2017/09/sebarkan-foto-bugil-mantan-pacar-dua-warga-kemiling-diciduk-polisi/>
- <https://lampung.tribunnews.com/2019/06/29/sebut-jokowi-komunis-dan-polri-gila-warga-lamsel-ditangkap-polda-lampung>
- <https://radarlampung.co.id/2018/11/05/ini-penyebab-hoax-kasus-penculikan/>
- <https://www.tribunnews.com/regional/2019/04/09/oknum-polisi-berpangkat-brigpol-terlibat-pembobolan-atm-masih-diperiksa-intensif>
- <https://radarlampung.co.id/2019/04/08/dokter-asal-lampung-tersangka-hoax-server-kpu-disetting/>
- <https://www.teraslampung.com/cegah-berita-hoax-polda-ajak-jurnalis-berikan-informasi-akurat/>

## LAMPIRAN

### 1. Ketua Tim Peneliti (Intan Fitri Meutia, Ph.D.)



The screenshot shows a web browser window with the URL `sinta2.ristekdikti.go.id/author/?mod=profile&p=stat`. The page features a navigation menu with options like HOME, ABOUT, AUTHORS, SUBJECTS, AFFILIATIONS, SOURCES, REGISTRATION, FAQ, AUTHOR LOGIN, PROFILE, and LOGOUT. The main content area displays the author's profile for Intan Fitri Meutia, Ph.D., including a profile picture, Author ID (5975146), and various statistics. The author's subjects are listed as Public Policy, Public Administration, and Social Studies. The page also shows a table of publication statistics for Scopus and Google Scholar.

Author ID: 5975146 (verified)

Full Name: INTAN FITRI MEUTIA

Author Subject: Public Policy, Public Administration, Social Studies

Title: Ph.D.

Affiliation: UNIVERSITAS LAMPUNG

Department: Administrasi Negara (Si)

More

	Articles	Citations	H-Index	i10-Index
Scopus	0	0	0	0
Google Scholar	16	2	1	0



## 2. Anggota Tim Peneliti 1 (Dra. Dian Kagungan, M.H.)

SINTA - Science and Technology X +

Not Secure | sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6041120&view=ove... | Search | Star | Home

Sinta Indonesia | HOME | ABOUT | **AUTHORS** | SUBJECTS | AFFILIATIONS | SOURCES | REGISTRATION | FAQ | AUTHOR LOGIN

Author Profile

**DIAN KAGUNGAN**  
 Universitas Lampung  
 Fisip Universitas Lampung  
 SINTA ID : 6041120  
 Subjects/Areas:  
 ID  
 Administrasi negara

<b>sinta</b>	0.08 Overall Score	59035 Rank in National	598 Rank in Affiliation
	0 3 Years Score	75115 3 Years National Rank	718 3 Years Affiliation Rank
	0 Books	0 IPR	
<b>Scopus'</b>	0 Journal Articles	0 Book Chapters	0 Conference Papers

Overview | Books | IPR | Network | GS Documents | WoS Documents | Scopus Documents

Documents per Year **Scopus'**

Citations per Year **Google**

Documents per Year **WEB OF SCIENCE'**

Score	Documents	Citations	H-Index	I0-Iindex
<b>Scopus'</b>	0	0	0	0
<b>Google</b>	30	8	1	0
<b>WEB OF SCIENCE'</b>	0	-	-	-

Top 5 Papers by Citations

Paper Title	Citation
Studi Formulasi Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Di Kota Bandar Lampung	6
Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat I vol: I Issue : I 2012	
Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Publica 2 (1) I vol: I Issue : I 2012	1
PENGENTASAN KEMISKINAN DESA PESISIR MELALUI OPTIMASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN	1

### 3. Anggota Tim Peneliti 2 (Nana Mulyana, S.IP., M.Si.)

**Author Profile**

**NANA MULYANA**  
 Universitas Lampung  
 Administrasi Negara  
 SINTA ID : 6156803  
 Subjects/Areas:  
 ID

<b>Overall Score</b>	0	<b>Rank in National</b>	133972	<b>Rank in Affiliation</b>	985
<b>3 Years Score</b>	0	<b>3 Years National Rank</b>	133853	<b>3 Years Affiliation Rank</b>	984
<b>Books</b>	0	<b>IPR</b>	0		
<b>Scopus' Research Output</b>	0	<b>Journal Articles</b>	0	<b>Book Chapters</b>	0
				<b>Conference Papers</b>	0

[Overview](#) | [Books](#) | [IPR](#) | [Network](#) | [GS Documents](#) | [WoS Documents](#) | [Scopus Documents](#)

**Documents per Year** | **Citations per Year** | **Documents per Year**

Score	Documents	Citations	H-Index	I10-Index
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	-	-	-

**Top 5 Papers by Citations**

	Citation

#### 4. Anggota Tim Peneliti 3 (Dr. Novita Tresiana, M.Si.)

**Author Profile**

**NOVITA TRESIANA**  
 Universitas Lampung  
 Administrasi Negara  
 SINTA ID : 5975918  
 Subjects/Areas:  
 ID  
 Administrasi Negara, Administrasi Publik

<b>SINTA</b>	0.48 Overall Score	33872 Rank in National	357 Rank in Affiliation
	0.01 3 Years Score	46481 3 Years National Rank	450 3 Years Affiliation Rank
	6 Books	0 IPR	
<b>Scopus'</b>	0 Research Output	0 Journal Articles	0 Book Chapters
			0 Conference Papers

**Documents per Year** **Scopus'**

**Citations per Year** **Google**

Year	Documents
2015	1
2016	11
2017	11
2018	15

**Documents per Year** **WEB OF SCIENCE'**

Source	Documents	Citations	H-Index	i10-Index
<b>Scopus'</b>	0	0	0	0
<b>Google</b>	25	49	2	1
<b>WEB OF SCIENCE'</b>	0	-	-	-

**Top 5 Papers by Citations**

Paper Title	Citation
Pemodelan dalam Forum Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran POLITIK 12 (2), 1829-1844   vol: 1   Issue : 1 2016	2
Kegagalan pemaknaan "Lembaga Musawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa" dalam mewujudkan deepening democracy Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 29 (4), 191-203   vol: 1   Issue : 1 2016	2
Rasionalitas dan Pembuatan Keputusan Kebijakan Yogyakarta. Graha Ilmu   vol: 1   Issue : 1 2015	2

## B. CV TIM PENELITIAN

### 1. Biodata Ketua Pengusul Penelitian Unggulan Universitas Lampung 2019

#### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (gelar)	Intan Fitri Meutia, SAN., MA., Ph.D.
2	Jabatan Fungsional/Gol	Lektor/III c
3	Jabatan Struktural	Sekretaris Jurusan Administrasi Negara
4	NIP	198506202008122001
5	NIDN	0020068502
6	Tempat Tanggal Lahir	Banda Aceh, 20 Juni 1985
7	Alamat Rumah	Jl. Sultan Badaruddin, Gg. Dahlia No.3
8	No.Telp/Hp	081369694554
9	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brodjonegoro 1 Gedung Meneng Bandar Lampung
10	No. Telp/Fax	(0721) 701609,701888/701888
11	Alamat e-mail	<a href="mailto:intan.fitri@fisip.unila.ac.id">intan.fitri@fisip.unila.ac.id</a>
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= orang S2= orang S3= orang
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Reformasi Administrasi Publik
		2. Managemen Strategis Sektor Publik
		3. Metode Penelitian Administrasi Publik
		4. Analisis Kebijakan Publik

#### B. Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan			
Program	S1	S2	S3
Nama PT	Univ. Lampung	Univ. Indonesia	Kanazawa University, Japan

Bidang Ilmu	Ilmu Administrasi Negara	Magister Ilmu Administrasi	Human and Socio Environmental Studies
Thn Masuk	2004	2010	2013
Thn Lulus	2008	2012	2016
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Kebijakan Pencegahan Trafficking di Provinsi Lampung (Studi Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Trafficking oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan)	Evaluasi Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahap "Trust Building" Periode 2005-2010	The Implementation of Community Policing in Indonesia
Nama Pembimbing Skripsi dan Tesis	Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si  Simon Sumanjoyo Hutagalung, SAN., MAP.	Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.	Prof. Haruya Kagami  Prof. Nobuhide Otomo  Prof. Yoichi Nishimoto

### C. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan
1	2012	Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Trafficking Berbasis Pengelolaan Data pada Koordinasi	DIPA BLU Junior - Universitas Lampung

		Gugus Tugas (Ketua)	
2	2012	Evaluasi Kebijakan Responsif Gender Bidang Pendidikan di Provinsi Lampung (anggota)	DIPA BLU FISIP - Universitas Lampung
3	2013	Penerapan Model 7s Mc. Kinsey di PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Lampung (Suatu Analisis atas Dampak, Budaya, Organisasi bagi Peningkatan Kinerja di Badan Usaha Milik Negara) (anggota)	DIPA BLU Junior - Universitas Lampung
4	2013	Model Jaringan Kelembagaan dalam Rangka Akselerasi Penyelenggaraan Pendidikan pada Daerah Otonom Baru di Propinsi Lampung (anggota).	Hibah Dikti - Penelitian Produk Terapan
5	2017	PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI BERBASIS DAYA SAING DAERAH (Implementasi Kebijakan Technopark di Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung tahun 2017)	DIPA BLU FISIP – Universitas Lampung
6	2018	Model Kebijakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang Ramah Anak Berbasis Kemandirian	Hibah Penelitian Pascasarjana DIPA BLU Universitas Lampung

		dan Budi Pekerti	
7	2018	Kesenjangan Digital (Digital Divide) pada Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer	DIPA BLU FISIP – Universitas Lampung

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2008	Penataran Peningkatan Pengelolaan Program-Program Pembangunan Bagi Aparat Desa di Kecamatan Sidomulya –Lampung Selatan	Dipa Unila	3.500.000
2	2009	Pemberdayaan Karang Taruna – Pemuda Desa di Kecamatan Gisting, Tanggamus	Dipa FISIP Unila	5.000.000
3	2009	Penyuluhan dan Pelatihan Administrasi Perkantoran Bagi Sekretaris Desa di Kecamatan Abung Barat – Lampung Utara	Jurusan Administrasi Negara Fisip Unila	5.000.000
4	2012	Penyuluhan Hukum Mengenai Penggunaan Alat-Alat Teknologi Informasi Yang Aman Bagi Remaja Sesuai Dengan UU NO.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik di SLTP Negeri 7 Bandar Lampung.	Dipa Unila	3.500.000
5	2012	Pelatihan untuk Pelatih (Training for Trainer) Manajemen Organisasi Intra Sekolah Bagi	Jurusan Administrasi	5.000.000

		Pengurus OSIS Se-KKM MAN 1 Metro Lampung Tengah.	Negara	
6	2017	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa dan Penguatan Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) melalui Diklat Pembuatan Website Program Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal	Jurusan Administrasi Negara	20.000.000
7	2018	Pendidikan dan Pelatihan Kapasitas Pokdarwis dan Penguatan Peran Ekonomi Perempuan Pesisir dalam Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal	Jurusan Administrasi Negara	20.000.000

#### **E.Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/ No
1	2008	Kebijakan Pencegahan Trafficking di Propinsi Lampung Tahun 2007	Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 5 bulan Juli-Desember 2008	2/5
2	2015	Balinese vs Lampungnese : Measuring ADR Applicability to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia.	Jurnal US-China Law Review. Vol.12 No. 1 January 2015,	12/1
3	2015	Community Policing to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia : A Case Study of Lampungnese VS Balinese.	Jurnal Human And Socio-Environinental Studies No.29 March 2015	29
4	2016	An Overview : Community Policing on Past and Present.	Jurnal Human And Socio-Environinental Studies No.31 March 2016,	31

		Jurnal Human And Socio- Environmental		
5	2017	Penerapan Chiki Keibi Sebagai Implementasi Community Policing di Jepang	Journal of Communication Studies, 2 (1) . pp. 88-99	2

**F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah 5 tahun terakhir**

No	Nama pertemuan ilmiah	Judul	Waktu	Tempat
1.	The Fifth Asian Conference on the Social Sciences 2014.	Community Policing to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia (Study Case Lampungnese vs Balinese)	12-15 Juni 2014	Osaka, Japan
2	The 9th East Asian Conference on Philosophy of Law	Measuring ADR Applicability to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia	21-23 September 2014	Seoul, South Korea.
3.	Seminar Nasional Fisip UNILA (SeFiLa) 2	Peningkatan Potensi Daerah Melalui Inovasi Techno Park di Provinsi Lampung	18 Oktober 2017	Bandarlampung, Lampung, Indonesia
4.	The 2nd SHIELD International Conference	Waste Bank: The Strategy and Community Based Environmental Governance	2017	Bandarlampung, Lampung, Indonesia

5.	The 1st IICIS (Indonesian International Conference on Interdisciplinary Studies	1) Children`s Right to Internet Devices: A Social Approach on Indonesian Policy  2) E-Tourism Governance Policy for Coastal Village in Pesawaran Regency	9-10 Septem ber 2018	Bandarlampung, Lampung, Indonesia
6.	The 1st I-COFFES	Models of Policy Making: Juvenile Detention Center and Self Reliance Program	7-8 Septem ber 2018	Bandarlampung, Lampung, Indonesia

#### **G.Pengalaman Penulisan Buku 5 tahun terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Ruang Hijau Untuk Bermain dalam Buku Berbagi Inspirasi dari Negeri Sakura.	2015	153 (80-86)	Nida Dwi Karya Publishing
2.	Buku Ajar "Analisis Kebijakan Publik - Prodi S2 MIA"	2017		Aura Publisher
3.	Buku Ajar "Reformasi Administrasi Publik - Prodi S1 Adm. Publik"	2017		Aura Publisher

#### **I.Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 5 tahun terakhir**

No	Judul /Tema Rekayasa Sosial	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat
1.	Kajian Usulan Teknis, Besaran Presentase	2016	Kota Tangerang	

	Retribusi Parkir Tepi Jalan (Jahan Fasos Fasum / Prasarana, Sarana dan Utilitaas Kota Tangerang Selatan)		Selatan	
2.	Kajian Naskah Akademik, Pemanfaatan Panas Bumi Secara Langsung	2017	Provinsi Lampung	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 25Februari 2019  
Hormat Saya,

Intan Fitri Meutia, Ph.D.  
NIP. 198506202008122001

**2. Biodata Anggota Tim Penelitian 1 (Dra. Dian Kagungan, MH.)**  
**A. Identitas Diri**

Nama	Dra DIAN KAGUNGAN MH
NIDN/NIDK	0015086903
Pangkat/Jabatan	-/Lektor
E-mail	diankagungan@gmail.com
ID Sinta	6041120
h-Index	0

**B. Publikasi di Jurnal Internasional terindeks**

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Communities Empowerment an Collaboration Between Stakeholders on Utylization of community forest	co-author	juunal of law, policy and globalization, 2018, 78, 78, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (on line)	<a href="http://iistie.org">http://iistie.org</a> <hr/>
2	STRATEGY FOR BUILDING COMMUNITY-RELIANCE IN MANAGING AND UTILIZING COMMUNITY FORESTS THROUGH THE POLICY OF COMMUNITY FORESTS DEVELOPMENT.	co-author	Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 7 (79). pp. 323-333. ISSN 2226-1184 , 2018, 7 (79). pp. 323-33 , 7 (79). pp. 323-333, 2226-1184	<a href="https://rjoas.com/">https://rjoas.com/</a> <hr/>

3	The Effect of Decentralization on Helath Services: The Experient of Pesawaran District, Lampung Province, Indonesia The Social Science Journal: 12 (11) 2164-2168, 2017	co-author	The Social Science, 2017, 11, 12 , 1818-5800	<a href="http://socail scienc">http://socail scienc</a> <hr/>
---	--	-----------	--	--

### C. Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

### D. Prosiding seminar/konverensi internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E- ISSN	URL artikel (jika ada)
No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E- ISSN	URL artikel (jika ada)
1	The Capacity Development Policy for Apparatur through New Government Partnership corporation in Lampung to Obtain Optimum Public Services	first author	2nd sHIELD UNILA, 2017, , 0000-0000-0000	<a href="http:// shield unila">http:// shield unila</a> <hr/>
2	Policy Implementation on civil servant recruitment bassed on computer assisted test in lampung	co-author	1st sHIELD UNILA , 2016, , 1, 0000-0000-0000	<a href="http:// universitas">http:// universitas</a> <hr/>

### E. Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
1	KEBIJAKAN NEGARA DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN: STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN MANGROVE STUDI PADA MASYARAKAT PULAU PAHAWANG	2018	978-623-211-018-2	Aura Publishing	<a href="http://repository.un">http://repository un</a>
2	Kebijakan hutan kemasyarakatan	2017	978-602-5636-33-2	Aura Publishing	<a href="http://repository.un">http://repository.un</a>
3	kebijakan penatakelolaan pariwisata di daerah otonom baru	2017	978-605-5637-09-07	Aura Publishing	<a href="http://repository.lp">http://repository.lp</a>
4	manajemen sumber daya aparatur publik	2016	978-602-6565-82-2	Aura Publishing	-

### F. Perolehan KI

No	Judul KI	Tahun Peroleh	Jenis KI	Nomor	Status KI (terdaftar/grant)	URL (jika)
----	----------	---------------	----------	-------	-----------------------------	------------

		an			ed)	ada)
1	KEBIJAKAN PENATAKELOLA AN PARIWISATA DI DAERAH OTONOM BARU	2018	Hak Cipta a	0001269 18	Granted	<a href="https://e-hakcipta.d">https://e-hakcipta.d</a>

### 3. Biodata Anggota Tim Penelitian 2 (Nana Mulyana, S.IP., M.Si.)

#### 4. Biodata Anggota Tim Penelitian 3 (Dr. Novita Tresiana, M.Si)

##### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Si.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	197209182002122002
5	NIDN	0018097205
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandar Lampung, 18-09-1972
7	E-mail	<a href="mailto:novitatresiana@yahoo.co.id">novitatresiana@yahoo.co.id</a>
8	Nomor Telepon/HP	081279093299
9	Alamat Kantor	Jl Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Gedung Meneng Bandar Lampung
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 100 orang; S-2= 10 orang; S-3= 0orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Publik (S1)</li> <li>2. Kebijakan Publik dan Aplikasinya (S2)</li> <li>3. Pengambilan Keputusan dalam Kebijakan Publik (S2)</li> <li>4. Politik dan Kebijakan Publik (S2)</li> <li>5. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (S1)</li> <li>6. Dasar Logika (S1)</li> <li>7. Filsafat Ilmu (S2)</li> <li>8. Metode Penelitian Sosial (S2)</li> <li>9. Manajemen Publik (S2)</li> <li>10. Administrasi Pelayanan Publik</li> <li>11. Teori Administrasi Publik dan Aplikasinya (S2)</li> </ol>

##### B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program	S-1	S-2	S-3
2.2	Nama PT	Universitas Lampung	Universitas Brawijaya	Universitas Padjajaran
2.3	Bidang Ilmu	Pemerintahan	Administrasi Publik	Administrasi Publik
2.4	Tahun Masuk	1991	1998	2009
2.5	Tahun Lulus	1995	2000	2012
2.6	Judul Sripsi/Tesis/ Disertasi	Pengaruh Mutasi Terhadap Semangat Kerja Karyawan	Pemberdayaan Petani Wanita Pedesaan (Studi tentang <i>Survival Strategies</i> Petani Wanita melalui Kumpulan Tani di Kabupaten Lampung Selatan	Formulasi Program Pendidikan Perempuan Pada Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
2.7	Nama Pembimbing/ Promotor	Dr. Drs. Irawan Suntoro,MS Drs. A	Prof.Dr.Drs. HR.Riyadi Soeprapto,MS	Prof.Dr.Drs.H Asep Kardiwa,MS Prof.Dr.Drs.Josy

		Effendi,MM	Prof.DR. HA.Andi Gani,MS	Adiwisastra DR.Drs.Heru Nurasa,MA
--	--	------------	-----------------------------	---

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan skripsi, tesis, disertasi)**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1	2017	Model Pengembangan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas	Hibah Desentralisasi (PPT)	67.500.000
2	2016	Kajian Wanita, Anak dan Gender di Propinsi Lampung: <i>Sustainable Development Goals</i> dan Implementasinya Dalam Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, Kebijakan Pendidikan, Kualitas Kesehatan Dan Kerentanan Ekonomi Perempuan	Hibah Institusi Unila	75.000.000
3	2016	Kegagalan Pemerintah Lokal dalam Pembangunan Era Otonomi Daerah di Kabupaten Lampung Selatan - Tahun Kedua	Hibah Kompetitif Nasional – Fundamental	60.000.000,-
4	2015	Kegagalan Pemerintah Lokal dalam Pembangunan Era Otonomi Daerah di Kabupaten Lampung Selatan) - Tahun Pertama	Hibah Kompetitif Nasional – Fundamental	50.000.000,-
5	2015	<i>Public Service Delivery Models</i> di Propinsi Lampung- Tahun Kedua	Hibah Kompetitif Nasional – Stranas	75.000.000,-
6	2015	Evaluasi Formulasi Kebijakan PUG di Propinsi Lampung	DIPA Unggulan Fakultas Fisip Unila	13.000.000
7	2014	Kebijakan Ketenagakerjaan Di Propinsi Lampung	DIPA Fisip Unila	6.000.000
8	2006	Program-Program Pembangunan yang Responsif Gender dan <i>Cooperate Building Strategy</i> (Studi pada	Kajian Wanita Dikti	10.000.000

		Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung)		
--	--	---	--	--

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul PKM	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp.)
1	2014	Peningkatan Kompetensi Forum Musrenbang Desa di Kabupaten Tanggamus	DIPA BLU UNILA	5.000.000
2	2014	Pelatihan Metode PRA untuk Merumuskan Program Pembangunan Desa di Kecamatan Jatimulyo Lampung Selatan	DIPA BLU UNILA	5.000.000
3	2014	Pelatihan Pembentukan Satgas Narkob a Di Tingkat Desa Pada Kecamatan Jatimulyo Lampung Selatan	DIPA FISIP UNILA	5.000.000
4	2014	Pelatihan Penyusunan APB Desa di Lampung Selatan	BOPTN Unila	5.000.000
5	2013	Pelatihan Penyusunan Maklumat dan Standar Pelayanan Publik di kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	DIPA BLU FISIP	5.000.000
6	2013	Pelatihan Penyusunan Maklumat dan Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	DIPA BLU Unila	5,000,000

#### E. Publikasi Artikel Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Kegagalan Pemaknaan Lembaga Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa dalam mewujudkan <i>Deepening Democracy</i>	Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Unair Terakreditasi SK Dikti No. 81/DIKTI/Kep/2011	Vol. 29, No.4, Oktober-Desember 2016
2	<i>Multi Stakeholders</i>	MIMBAR: Jurnal Sosial dan	Vol. 32, No.

	<i>Governance Body Model in Achieving The Excellence Public Policy</i>	Pembangunan. ISSN 0215-8175. Pusat Penerbitan Universitas (P2U-LPPM) Unisba, laman (ejurnal): <a href="http://mimbar.lppm.unisba.ac.id">http://mimbar.lppm.unisba.ac.id</a> Terakreditasi SK. DIKTI No. 040/P/2014	2 (Desember 2016)
3	Rasionalitas Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung (H. 161-1720)	Bina Praja: ISSN 2085-4323 Terakreditasi A, SK No. 337/E/2013 Tanggal 16 April 2013	Vol. 7/No.2 Edisi Juni 2015
4	Perumusan Kebijakan Pendidikan Yang Berperspektif Gender di Propinsi Lampung	BORNEO ADMINISTRATOR: ISSN 1858-0300 Terakreditasi B , SK No. 505/AUI/P2MI-LIPI/10/2012 Laman (ejurnal): <a href="http://www.samarinda.lan.go.id/jba">url:www.samarinda.lan.go.id/jba</a>	Volume 11/No.2/2015 Hal. 154-179.

#### F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

#### G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	New Public Service dan Musrenbang Desa	2016	160	Suluh Media 978-602-8610-05-6
2	Rasionalitas dan Pembuatan Keputusan Kebijakan	2015	113	Graha Ilmu 978-602-262-513-1

#### H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

#### I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				

**J. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima saksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan PKM

Bandar Lampung, 15 April 2019

Ketua,

Dr. Novita Tresiana, S.Sos,M.Si